

ANALISIS PENGARUH MEKANISME *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP PRAKTEK MANAJEMEN LABA PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2005-2007

Teguh Setiawan

Kartika Management Consultant (KAP Drs J. Tanzil dan rekan)
teguh_6212@yahoo.com

Abstract

Earnings management is management intervention in financial statement reporting process, aimed to increase management's wealth personally and/or increase value of the firm. Earnings management is a factor that could reduce financial statement credibility, increase bias, and prevent stakeholders from believing profit values. Consistent good corporate government implementation is indicated could increasing financial statement quality and reduce earnings management activities.

This research purpose is to find out whether corporate governance mechanisms, consists of institutional ownership, managerial ownership, proportion of independent board of commissioner, board of director, and audit committee, influence earnings management. The object of this research is manufacturing companies listed in Indonesian Stock Exchange in 2005-2007. There are ninety six companies selected with purposive sampling techniques and data was analyzed using multiple linier regression.

The results show that proportion of independent board of commissioners and audit committee variables influence earnings management partially and significantly. Institutional ownership, managerial ownership, and independent board of commissioner's variables didn't influence earnings management. Simultaneously, good corporate governance mechanisms influence earnings management significantly.

Keywords: *Good corporate governance mechanisms, Earnings management*

Pendahuluan

Masalah agensi telah menarik perhatian yang sangat besar dari para peneliti di bidang akuntansi keuangan. Teori keagenan (*agency theory*), muncul ketika satu orang atau lebih (*principal*) mempekerjakan orang lain (*agent*) untuk melakukan suatu pekerjaan dan mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada *agent* tersebut. Dalam perusahaan, masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan manajer (*agent*), karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Sebagai *agent*, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (*principal*), namun disisi yang lain manajer juga mempunyai kepentingan memaksimalkan kesejahteraan mereka. Jadi ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*.

Manajer sebagai pengelola perusahaan, diharapkan dapat memberikan performa yang terbaik bagi perusahaan serta memberikan informasi yang berkaitan dengan perusahaan kepada semua pihak yang berkepentingan melalui suatu media yang disebut laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan sarana utama melalui mana informasi keuangan dikomunikasikan kepada pihak-pihak di luar perusahaan, untuk mengambil keputusan investasi yang tepat. Untuk itu, laporan keuangan harus mampu menggambarkan posisi keuangan dan hasil-hasil usaha perusahaan pada saat tertentu secara wajar.

Dalam penyusunan laporan keuangan, dasar akrual dipilih karena memberikan indikasi lebih baik tentang kinerja ekonomi perusahaan daripada informasi yang dihasilkan dari aspek penerimaan dan pengeluaran kas terkini (FASB, 1978 dalam Achmad dkk, 2007'), namun dasar akrual juga memiliki kelemahan. Akuntansi akrual memberikan fleksibilitas kepada pihak manajemen dalam memilih metode akuntansi selama tidak menyimpang dari aturan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku, sehingga dapat memberi kesempatan bagi manajemen untuk melakukan pengelolaan laba. Jika pihak manajemen ternyata tidak berhasil mencapai target laba yang ditentukan, maka manajemen akan mampu memanfaatkan fleksibilitas yang diperbolehkan oleh standar akuntansi dalam menyusun laporan keuangan untuk memodifikasi laba yang dilaporkan. Pengelolaan laba yang secara sengaja dipilih oleh manajemen untuk tujuan tertentu dikenal dengan sebutan manajemen laba atau *earnings management*.

Penerapan konsep *good corporate governance* secara konsisten diindikasikan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dan menjadi penghambat aktivitas manajemen laba. *Good corporate governance* berkaitan dengan memotivasi perilaku manajerial dengan benar untuk meningkatkan bisnis, dengan secara langsung mengendalikan perilaku manajer.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007). Hasil dari penelitian terdahulu menunjukkan bahwa mekanisme *good corporate governance* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. Akhir-akhir ini telah menjadi sebuah fenomena khususnya di dunia pasar modal, bahwa beberapa mekanisme yang berkaitan dengan praktik *good corporate governance* ternyata diindikasikan mampu menghambat aktivitas manajemen laba. Oleh karenanya, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme *good corporate governance* dengan aktivitas manajemen laba pada perusahaan *go public* yang bergerak di sektor manufaktur, dengan periode penelitian 2005-2007. Perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dipilih karena 40% dari seluruh perusahaan yang termasuk dalam IHSG merupakan perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur, sehingga perusahaan manufaktur dipandang dapat mewakili dunia pasar modal. Periode penelitian dipilih dengan alasan karena penelitian sekarang ingin melanjutkan penelitian terdahulu. Proksi yang digunakan untuk mewakili mekanisme *good corporate governance* adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit. Diduga kelima mekanisme *good corporate governance* mampu mengurangi manajemen laba yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang *go public* di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah mekanisme *corporate governance*, dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan keberadaan komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh terhadap manajemen laba.

Rerangka Teori dan Hipotesis

Teori Keagenan

Perspektif hubungan keagenan merupakan dasar yang digunakan untuk memahami *corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) dalam Ujijantho dan Pramuka (2007) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*principal*). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan *principal*, sehingga memicu biaya keagenan.

Teori keagenan merupakan teori tentang kepemilikan dan pendelegasian pengelolaan (kontrak), yang memandang keberadaan suatu perusahaan sebagai hasil dari *quasi* perjanjian antar berbagai pihak, antara lain, manajemen, pemegang saham, kreditur, pemerintah serta masyarakat. Teori ini menjelaskan mengenai hubungan keagenan yang didefinisikan sebagai hubungan yang timbul karena adanya kontrak yang ditetapkan antara dua pihak, yaitu pihak yang mendelegasikan pekerjaan disebut sebagai *principal* dan pihak yang menerima pendelegasian pekerjaan disebut sebagai *agent*, dimana *principal* menggunakan *agent* untuk melakukan jasa yang menjadi kepentingan *principal*.

Dalam kontrak kerja, *agent* sebagai pihak yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dana dari *principal* harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dipercayakan kepadanya dan sebagai imbalan, *agent* akan menerima insentif berupa berbagai macam fasilitas baik *finansial* maupun *non finansial*. Namun, menurut teori keagenan hubungan antara pihak-pihak tersebut pada hakekatnya sukar tercipta karena adanya kepentingan yang saling bertentangan (*conflict of interest*). Adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan suatu perusahaan sangat mungkin menyebabkan terjadinya konflik antara *principal* dan *agent* untuk saling mencoba memanfaatkan pihak lain untuk kepentingannya sendiri. Dalam hal ini, *agent* termotivasi untuk memaksimalkan *fee* kontraktual yang diterimanya dan *principal* berusaha untuk memaksimalkan *return* atas penggunaan sumber dayanya.

Konflik kepentingan yang dikarenakan oleh kemungkinan bahwa agen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan *principal* memicu terjadinya biaya keagenan. Biaya tersebut berupa biaya monitoring untuk memantau tindakan manajemen, biaya *bonding* yaitu pengeluaran untuk menata struktur organisasi demi meminimumkan perilaku manajer yang tidak dikehendaki dan biaya kesempatan memperoleh laba yang dikeluarkan sebagai resiko karena membatasi kewenangan manajemen untuk mengambil keputusan tepat waktu.

Manajemen Laba

1. Definisi Manajemen Laba

Scott (2000) dalam Halim dkk. (2005) membagi cara pemahaman atas manajemen laba menjadi dua. Pertama, melihatnya sebagai perilaku oportunistik manajer untuk memaksimalkan utilitasnya dalam menghadapi kontrak kompensasi, kontrak utang dan *political cost* (*opportunistic earnings management*). Kedua, dengan memandang manajemen laba dari perspektif *efficient contracting* (*efficient earnings management*), dimana manajemen laba memberi manajer suatu fleksibilitas untuk melindungi diri mereka dan perusahaan dalam mengantisipasi kejadian-kejadian yang tak terduga untuk keuntungan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak. Dengan demikian, manajer dapat mempengaruhi nilai pasar saham perusahaannya melalui manajemen laba, misalnya dengan membuat perataan laba (*income smoothing*) dan pertumbuhan laba sepanjang waktu.

Sugiri (1998) dalam Widyaningdyah (2001) membagi definisi manajemen laba menjadi dua, yaitu:

a. Definisi sempit

Earning management dalam hal ini hanya berkaitan dengan pemilihan metode akuntansi. *Earning management* dalam artian sempit ini didefinisikan sebagai perilaku manajer untuk “bermain” dengan komponen *discretionary accruals* dalam menentukan besarnya *earnings*.

b. Definisi luas

Earning management merupakan tindakan manajer untuk meningkatkan (mengurangi) laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit dimana manajer bertanggung jawab, tanpa mengakibatkan peningkatan (penurunan) profitabilitas ekonomis jangka panjang unit tersebut.

Menurut Merchan (1989) dalam Ma'ruf (2006) manajemen laba didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk mempengaruhi laba yang dilaporkan yang bias memberikan informasi mengenai keuntungan ekonomis (*economic advantage*) yang sesungguhnya tidak dialami perusahaan, yang dalam jangka panjang tindakan tersebut bisa merugikan perusahaan.

2. Faktor-Faktor Pendorong Manajemen Laba

Dalam *positif accounting theory* terdapat tiga hipotesis yang melatarbelakangi terjadinya manajemen laba (Watt dan Zimmerman, 1986) dalam Rahmawati dkk. (2007), yaitu:

a. *Bonus plan hypothesis* (hubungan antara pemilik dengan manajemen)

Dalam kasus ini, kinerja serta insentif yang akan diterima oleh manajer dinilai berdasarkan laba yang dihasilkan perusahaan, sehingga manajer akan cenderung berperilaku oportunis dengan memilih untuk menggunakan metode akuntansi yang dapat meningkatkan laba. Dengan demikian kinerjanya akan tampak baik sehingga manajer dapat memaksimalkan insentif yang diterimanya.

b. *Debt covenant hypothesis* (hubungan antara kreditor dengan manajemen)

Salah satu sumber pendanaan perusahaan adalah melalui pinjaman atau kontrak hutang, dimana dalam kontrak tersebut terdapat beberapa

persyaratan atau batasan yang harus dipenuhi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan cenderung melakukan *income increasing* untuk menjaga agar tidak melanggar persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Hipotesis ini menyatakan bahwa semakin dekat perusahaan pada pelanggaran terhadap persyaratan kredit, maka semakin besar kecenderungan manajer untuk melakukan praktik manajemen laba.

- c. *Political cost hypothesis* (hubungan antara pemerintah dengan manajemen) Hipotesis ini menyatakan bahwa perusahaan cenderung akan melakukan *income decreasing* untuk mengurangi visibilitas mereka. Perolehan laba yang tinggi dapat menyebabkan timbulnya biaya politik yang tinggi pula, seperti misalnya biaya pengenaan pajak yang tinggi dari pemerintah.

3. Teknik dan Pola Manajemen Laba

Teknik dan pola manajemen laba menurut Setiawati dan Na'im (2000) dalam Rahmawati dkk. (2006) dapat dilakukan dengan tiga teknik yaitu:

- a. Memanfaatkan peluang untuk membuat estimasi akuntansi. Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.
- b. Mengubah metode akuntansi. Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.
- c. Menggeser periode biaya atau pendapatan. Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk ke pelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Selain itu, adanya asimetri informasi antara manajemen dengan pengguna laporan keuangan lainnya juga merupakan peluang bagi manajer untuk melakukan manajemen laba. Kesuperioran manajer dalam memiliki informasi dan memperoleh informasi dengan lebih cepat dapat mendorong timbulnya aktivitas manajemen laba yang dapat mempengaruhi kredibilitas laporan keuangan serta menyesatkan pengguna lainnya.

4. Bentuk Manajemen Laba

Terdapat beberapa bentuk manajemen laba yang dapat dipilih oleh manajemen tergantung pada tujuan mereka melakukan manajemen laba. Scott (1997) dalam Achmad dkk. (2007) mengemukakan bentuk-bentuk manajemen laba yang dapat dilakukan oleh manajer antara lain:

- a. *Taking a bath*, pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan CEO baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa datang.
- b. *Income minimization*, dilakukan pada saat perusahaan mengalami tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba pada periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

- c. *Income maximization*, yaitu upaya perusahaan untuk memaksimalkan tingkat laba yang diperoleh melalui pemilihan metode-metode akuntansi dan pemilihan waktu pengakuan transaksi, seperti mempercepat pencatatan, dan menunda biaya. Upaya ini dilakukan agar manajemen mendapatkan bonus yang lebih besar (*bonus plan hypothesis*), dan juga pada saat perusahaan mendekati suatu pelanggaran kontrak hutang.
- d. *Income smoothing*, yaitu suatu bentuk manajemen laba yang paling sering dilakukan dan paling populer. Melalui *income smoothing*, manajer akan menurunkan laba jika terjadi peningkatan laba yang cukup besar, begitu pula sebaliknya, manajer akan menaikkan laba jika tingkat laba yang diperoleh dinilai rendah atau berada dibawah target. Dengan demikian manajer dapat mengurangi fluktuasi laba yang dilaporkan sehingga perusahaan terlihat stabil dan tidak beresiko tinggi.

5. Pengukuran Manajemen Laba

Manajemen laba (*earning management*) diproksikan dengan *discretionary accruals*. Dalam menghitung *discretionary accruals* suatu perusahaan harus ditentukan terlebih dahulu besarnya total akrual suatu perusahaan, dengan mengurangi laba bersih dengan arus kas dari aktivitas operasi suatu perusahaan.

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it} \dots\dots\dots(1)$$

- TA_{it} : Total akrual perusahaan i pada tahun t.
- NI_{it} : Laba bersih (*net income*) perusahaan i pada tahun t.
- CFO_{it} : Kas dari operasi (*cash flow from operation*) perusahaan i pada tahun t.

Total akrual sebuah perusahaan adalah penjumlahan dari *discretionary accrual* dan *non discretionary accrual*

$$TA_{it} = NDA_{it} + DA_{it} \dots\dots\dots(2)$$

- DA_{it} : *Discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t
- NDA_{it} : *Non discretionary accrual* perusahaan i pada tahun t

Selanjutnya digunakan modifikasi model Jones untuk mengukur manajemen laba. Dechow (1995) dalam Achmad dkk. (2007) memodifikasi model Jones dengan menambahkan perubahan piutang sebagai pengurang perubahan pendapatan. Penambahan ini dilakukan dengan asumsi bahwa semua penjualan kredit disebabkan oleh adanya praktik manajemen laba, karena akan lebih mudah untuk melakukan rekayasa dengan menggunakan penjualan kredit dibandingkan dengan penjualan tunai. Model ini digambarkan dengan rumus sebagai berikut:

$$TA_{it}/A_{it-1} = \alpha(1/A_{it-1}) + \beta_1(\Delta REV_{it}/A_{it-1}) + \beta_2(PPE_{it}/A_{it-1}) + \epsilon_{it} \dots\dots(3)$$

- TA_{it} : Total akrual perusahaan i pada periode t
- ΔREV_{it} : Perubahan pendapatan perusahaan i pada periode t
- PPE_{it} : Aktiva tetap perusahaan i pada periode t
- A_{it-1} : Total aset perusahaan i pada periode t-1
- ε_{it} : *Error term* perusahaan i pada periode t

Model ini diyakini dapat memberikan hasil yang lebih baik dalam pendeteksian manajemen laba.

Kemudian, dengan menggunakan koefisien regresi diatas (α, β₁, β₂) nilai *non discretionary accruals* dihitung dengan rumus:

- $NDA_{it} = \alpha'(1/ A_{it-1}) + \beta_1'(\Delta REV_{it} - \Delta REC_{it}) / A_{it-1} + \beta_2'(PPE_{it}/ A_{it-1}) ..(4)$
- NDA_{it} : *Non discretionary accruals* perusahaan i pada tahun t
- A_{it-1} : Total aktiva perusahaan i pada tahun t-1
- ΔREV_{it} : Perubahan pendapatan perusahaan i pada tahun t
- ΔREC_{it} : Perubahan piutang bersih perusahaan i pada tahun t
- PPE_{it} : Aktiva tetap perusahaan i pada tahun t
- α, β_1, β_2 : Koefisien Regresi model Jones
- $\alpha', \beta_1', \beta_2'$: *Fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi modifikasi model Jones

Selanjutnya, nilai *discretionary accruals* didapatkan dengan mengurangkan total akrual dengan nilai *non discretionary accruals*nya.

$$DA_{it} = TA_{it} / A_{it-1} - NDA_{it}(5)$$

Good Corporate Governance

Corporate governance merupakan suatu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksinya, para pemegang sahamnya dan *stakeholders* lainnya (OECD, 1999 dalam Darmawati dkk, 2004). *Corporate governance* juga memberikan suatu struktur yang memfasilitasi penentuan sasaran-sasaran dari suatu perusahaan, dan sebagai sarana untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut dan sarana untuk menentukan teknik pemantauan kinerja.

1. Definisi Corporate Governance

Sebelum membahas lebih jauh mengenai *corporate governance*, perlu kiranya memahami terlebih dahulu definisi *corporate governance*. Berikut adalah beberapa definisi tentang *corporate governance*:

- a. Shleifer dan Vishny (1997) dalam Boediono (2005) mengemukakan bahwa *corporate governance* merupakan suatu mekanisme yang dapat digunakan untuk memastikan bahwa *supplier* keuangan atau pemilik modal perusahaan memperoleh pengembalian atau return dari kegiatan yang dijalankan oleh manajer, atau dengan kata lain bagaimana *supplier* keuangan perusahaan melakukan pengendalian terhadap manajer.
- b. Menurut Forum for Corporate Governance Indonesia (2001) dalam Lindrawati (2003), “*Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.”
- c. Menurut Finance Committee on Corporate Governance Malaysia dalam Herwidayatmo (2000) mendefinisikan *corporate governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis dan kegiatan perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Adapun tujuan akhirnya adalah meningkatkan kemakmuran pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya. Definisi ini menekankan bahwa sebaik apapun suatu struktur *corporate governance* namun jika

prosesnya tidak berjalan sebagaimana mestinya maka tujuan akhir melindungi kepentingan pemegang saham dan *stakeholders* tidak akan pernah tercapai.

Berdasarkan pengertian dari *corporate governance* tersebut, aspek kunci dari *corporate governance* adalah pembangunan *legal* dan *regulatory framework* agar dapat tercapai praktik *corporate governance* yang bermanfaat bagi perusahaan serta perekonomian. Penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* umumnya diterjemahkan dalam suatu bentuk pengaturan internal yang mencakup filsafat bisnis perusahaan, panduan nilai-nilai yang mengatur tata cara mengelola perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya, pedoman menghadapi pelanggan, distributor, pemerintah dan pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perusahaan, termasuk didalamnya aturan yang mengatur perilaku persaingan yang sehat dengan pelaku usaha pesaing.

Corporate governance dikenal sebagai suatu bentuk mekanisme yang menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik bagi kepentingan *stakeholders*. Pelaksanaan *good corporate governance* menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan *corporate governance* menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat (Kartana, 2001 dalam Wignjohartojo, 2001). Dengan adanya *corporate governance* yang baik, keputusan-keputusan penting perusahaan tidak lagi hanya ditetapkan oleh satu pihak yang dominan, misalnya direksi, tetapi ditetapkan setelah mendapatkan masukan dari dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). *Corporate governance* yang baik mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih demokratis, karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan; lebih *accountable*, karena ada sistem yang meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan lebih transparan.

2. Unsur-Unsur *Corporate Governance*

Untuk mewujudkan *corporate governance* sebagai bentuk pengelolaan perusahaan yang baik, terdapat empat unsur penting yang merupakan bagian dari praktik *good corporate governance* yang harus selalu menjadi acuan dalam penyelenggaraan korporasi, yaitu (Isgiyarta dan Tristiarini, 2005):

- a. *Transparansi (transparency)*. *Transparansi* berkaitan dengan banyaknya *disclosure* atau keterbukaan informasi mengenai kinerja, struktur dan operasi perusahaan. Selain itu, *transparansi* juga menyangkut ketersediaan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada seluruh *stakeholder*. Hal ini berkaitan erat dengan kualitas informasi yang dihasilkan. Dengan adanya *transparansi*, pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan perusahaan, termasuk kreditor, pemasok, investor dan karyawan mengetahui resiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang mungkin diperoleh dalam melakukan transaksi dengan perusahaan.
- b. *Akuntabilitas (accountability)*. *Akuntabilitas* merupakan salah satu solusi pokok untuk mengatasi masalah *agency problem*. *Akuntabilitas* mencerminkan aplikasi sistem internal *checks and balances* yang mencakup

praktik-praktik audit yang sehat. Dengan demikian akuntabilitas akan tercapai dengan terciptanya pengawasan efektif yang berdasarkan pada pembagian wewenang, peranan, hak dan tanggung jawab antara pemegang saham, komisaris dan direksi.

- c. **Responsibilitas** (*responsibility*). Responsibilitas mencakup pertanggungjawaban perusahaan kepada *stakeholders*, yang antara lain meliputi aspek-aspek manajerial perusahaan, seperti sasaran dalam mencapai *cost efficiency*, peningkatan daya saing, menggali setiap potensi memperoleh laba, apakah manajemen telah mengambil langkah-langkah yang efektif dalam menangani mismanajemen dan apakah dewan direksi tetap mengutamakan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dan bukan hanya kepentingan pemegang saham mayoritas. Terkait pula dalam prinsip responsibilitas, pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan dimana perusahaan itu berada, seperti melalui program *community development*.
- d. **Keadilan** (*fairness*). Prinsip keadilan mencakup tentang perlunya kejelasan hak-hak pemodal, sistem hukum dan penegakan peraturan. Prinsip ini mewajibkan adanya kepastian perlindungan atas hak seluruh pemegang saham dari penipuan (*fraud*) dan penyimpangan lainnya.

3. Prinsip-Prinsip *Corporate Governance*

Menurut FCGI (2001:3) prinsip-prinsip internasional mengenai *corporate governance* mulai muncul dan berkembang akhir-akhir ini. Prinsip-prinsip tersebut mencakup:

- a. Hak-hak para pemegang saham, yang harus diberi informasi dengan benar dan tepat pada waktunya mengenai perusahaan, dapat ikut berperan serta dalam pengambilan keputusan mengenai perubahan-perubahan yang mendasar atas perusahaan, dan turut memperoleh bagian dari keuntungan perusahaan.
- b. Perlakuan sama terhadap para pemegang saham, terutama kepada pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing, dengan adanya keterbukaan informasi yang penting serta melarang pembagian untuk pihak sendiri dan perdagangan saham oleh orang dalam (*insider trading*).
- c. Peranan pemegang saham harus diakui sebagaimana ditetapkan oleh hukum dan kerjasama yang aktif antara perusahaan serta para pemegang kepentingan dalam menciptakan kekayaan, lapangan kerja dan perusahaan yang sehat dari aspek keuangan.
- d. Pengungkapan yang akurat dan tepat pada waktunya serta transparansi mengenai semua hal yang penting bagi kinerja perusahaan, kepemilikan, serta para pemegang kepentingan (*stakeholders*).
- e. Tanggungjawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham.

4. Tujuan dan Manfaat *Corporate Governance*

Tujuan dari pelaksanaan *corporate governance* adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) (FCGI, 2001:3). Menurut IICG dalam Mutia (2003) manfaat yang diperoleh perusahaan dengan menetapkan *corporate governance*:

- a. Meminimalkan *agency cost*
Biaya yang selama ini ditanggung oleh pemegang saham timbul sebagai akibat pendelegasian kewenangan kepada manajemen. Di mana biaya tersebut dapat menjadi kerugian karena manajemen menggunakan sumber daya perusahaan untuk kepentingan pribadi maupun berupa biaya pengawasan yang dikeluarkan untuk mencegah terjadinya kecurangan tersebut atau biaya ini lebih dikenal sebagai *agency cost*. Dengan penyusunan struktur dan pembagian fungsi yang baik maka biaya ini dapat ditekan serendah mungkin.
- b. Meminimalkan *cost of capital*
Perusahaan yang dikelola dengan baik dan sehat akan memberikan nilai positif bagi kreditor, dan hal ini dapat meminimalkan biaya modal yang harus ditanggung perusahaan dalam mengajukan pinjaman.
- c. Meningkatkan nilai saham perusahaan
Perusahaan yang baik akan menarik minat investor untuk menanamkan modalnya. Faktor utama yang dinilai investor sebelum membeli saham adalah kualitas dewan komisaris. Hal ini terlihat dari investor yang melakukan investasi jangka panjang.
- d. Meningkatkan citra perusahaan
Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan karena akan meningkatkan *shareholders value* dan dividen.

5. Mekanisme *Good Corporate Governance*

- a. Kepemilikan Institusional
Kepemilikan institusional adalah jumlah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi (Beiner, dkk., 2003; dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Institusi disini tidak memiliki afiliasi apapun dengan manajemen perusahaan. Kepemilikan institusional diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar. Kepemilikan Institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan (Faizal, 2004).
- b. Kepemilikan Manajerial
Kepemilikan manajerial diasumsikan mampu mengurangi tingkat masalah keagenan yang timbul pada suatu perusahaan. Kepemilikan manajerial itu lebih merupakan kompensasi bagi manajer. Melalui kompensasi ini kepentingan manajer dan kepentingan pemilik diselaraskan (Tunggal dan Tunggal, 2002:13).
- c. Proporsi Dewan Komisaris Independen
Komisaris independen merupakan salah satu komponen penting dari *good corporate governance*. Kriteria menjadi komisaris independen adalah sebagai berikut (FCGI, tanpa tahun:3):
 - a. Komisaris independen bukan merupakan anggota manajemen.
 - b. Komisaris independen bukan merupakan pemegang saham mayoritas, atau seorang pejabat dari atau dengan cara lain yang berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari perusahaan.

- c. Komisaris independen dalam kurun waktu tiga tahun terakhir tidak dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai eksekutif oleh perusahaan atau perusahaan lainnya dalam satu kelompok usaha dan tidak pula dipekerjakan dalam kapasitasnya sebagai komisaris setelah tidak lagi menempati posisi seperti itu.
 - d. Komisaris independen bukan merupakan penasehat profesional perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok dengan perusahaan tersebut.
 - e. Komisaris independen bukan merupakan seorang pemasok atau pelanggan signifikan dan berpengaruh dari perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok, atau dengan cara lain berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan pemasok atau pelanggan tersebut.
 - f. Komisaris independen tidak memiliki kontraktual dengan perusahaan atau perusahaan lainnya yang satu kelompok selain sebagai komisaris perusahaan tersebut.
 - g. Komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun atau hubungan lainnya yang dapat, atau secara wajar dapat dianggap sebagai campur tangan secara material dengan kemampuannya sebagai seorang komisaris untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan.
- d. Ukuran Dewan Komisaris
- Dewan Komisaris dibentuk sebagai organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam menjalankan perseroan dan memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan (Wignjohartojo, 2001). Dengan kata lain, dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang mensupervisi kebijakan dan tindakan direksi, dan memberikan nasihat kepada direksi bila diperlukan.
- Setiap anggota komisaris harus orang yang berkarakter baik dan memiliki pengalaman yang relevan. Setiap anggota komisaris dan dewan komisaris sebagai organisasi perseroan harus melaksanakan kewajiban mereka berdasarkan kepentingan terbaik perusahaan dan pemegang saham. Dewan komisaris juga harus mempertimbangkan kepentingan dari berbagai *stakeholders* dalam perusahaan (Tunggal dan Tunggal, 2002:25).
- Menurut Jansen (1993) dalam Ma'ruf (2006) jumlah dewan direksi yang relatif kecil dapat membantu meningkatkan kinerja mereka dalam memonitor manajer. Jumlah dewan direksi yang terlalu besar tidak dapat berfungsi secara optimal dan akan lebih mudah dikontrol oleh manajer, terutama karena dewan direksi sendiri disibukkan oleh masalah koordinasi.
- e. Komite Audit
- Sesuai dengan Kep. 29/PM/2004 dalam Nasution dan Setiawan (2007), komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan. Komite audit merupakan komponen baru dalam sistem pengendalian perusahaan. Selain itu komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan

komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian.

Berdasarkan Surat Edaran BEJ, SE-008/BEJ/12-2001 dalam Nasution dan Setiawan (2007), keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Tugas komite audit mencakup (Tunggal dan Tunggal, 2002:30):

1. Meningkatkan disiplin korporat dan lingkungan pengendalian untuk mencegah kecurangan dan penyalahgunaan.
2. Memperbaiki mutu dalam pengungkapan pelaporan keuangan.
3. Memperbaiki ruang lingkup, akurasi dan efektivitas biaya dari audit eksternal dan independensi dan obyektivitas dari auditor eksternal.

Pengembangan Hipotesis

H1: Diduga kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H2: Diduga kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H3: Diduga proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H4: Diduga ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

H5: Diduga komite audit berpengaruh negatif terhadap manajemen laba.

H6: Diduga kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap manajemen laba.

Metode Penelitian

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pengujian hipotesis untuk menguji pengaruh penerapan mekanisme *good corporate governance* terhadap praktek manajemen laba. Penelitian ini akan menguji pengaruh dari lima variabel independen (X_1 - X_5) terhadap variabel dependen (Y). Variabel terikat (Y) adalah manajemen laba (*earning management*) dan variabel bebas (*independent variable*), yaitu: kepemilikan Institusional (X_1), kepemilikan Manajerial (X_2), Proporsi Dewan Komisaris Independen (X_3), ukuran Dewan Komisaris (X_4), komite audit (X_5).

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Variabel-variabel yang ada dalam penelitian ini didefinisikan dan diukur dengan menggunakan perhitungan sebagai berikut:

1. Manajemen laba (*earning management*) yang merupakan suatu bentuk intervensi manajemen dalam proses penyusunan laporan keuangan eksternal diproksikan dengan *discretionary accruals* (DA). Indikasi bahwa perusahaan tidak melakukan manajemen laba adalah jika total akrualnya sama dengan nilai *non discretionary accrual* atau jika $DA_{it} = 0$. DA_{it} yang bernilai positif merupakan indikasi bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola *income increasing*, sedangkan DA_{it} yang bernilai negatif merupakan indikasi bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola *income decreasing*.
2. Kepemilikan institusional merupakan jumlah kumulatif dari presentase saham yang dimiliki oleh investor institusional (Beiner dkk, 2003 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Investor institusional disini tidak memiliki afiliasi apapun dengan manajemen perusahaan. Semakin besar kepemilikan investor institusional pada perusahaan, maka semakin rendah kecenderungan manajer melakukan aktivitas manajemen laba karena adanya fungsi pengawasan yang lebih baik dari investor yang *sophisticated*. Dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator persentase jumlah saham yang dimiliki institusi dari seluruh modal saham yang beredar.
3. Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola (Boediono, 2005). Semakin besar kepemilikan manajer semakin kecil kecenderungan untuk melakukan manajemen laba karena adanya kesejajaran kepentingan dan tujuan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.
4. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Komite Nasional Kebijakan Governance, 2004 dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007). Proporsi komisaris independen adalah perbandingan jumlah komisaris independen yang dimiliki suatu perusahaan terhadap jumlah seluruh anggota dewan komisaris. Semakin tinggi proporsi komisaris independen maka semakin baik fungsi pengawasan terhadap manajemen, sehingga dapat menghambat praktik manajemen laba. Proporsi komisaris independen yang disyaratkan oleh peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepem dan BEJ minimal adalah 30% dari jumlah seluruh anggota dewan atau proporsional dengan jumlah pemegang saham minoritas.
5. Ukuran dewan komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan (Beiner dkk, 2003 dalam Ujiyantho dan Pramuka, 2007). Dewan komisaris bertanggung jawab dan berwenang mengawasi tindakan manajemen, dan memberikan nasehat kepada manajemen jika dipandang perlu oleh dewan komisaris (KNKG, 2004 dalam Ujiyantho dan Pramuka 2007). Ukuran dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu perusahaan.

6. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit ditentukan dari ada tidaknya komite audit dalam perusahaan. Sehubungan dengan fungsi yang dimiliki komite audit, diindikasikan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit mempunyai aktivitas manajemen laba yang lebih rendah intensitasnya daripada perusahaan yang tidak mempunyai komite audit. Variabel ini juga merupakan variabel *dummy*, yaitu dengan menggunakan skala 1 untuk perusahaan yang memiliki komite audit, sedangkan skala 0 untuk perusahaan yang tidak memiliki komite audit.

Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk menghitung *discretionary accruals*, data yang digunakan adalah laporan laba rugi (laba bersih perusahaan), laporan arus kas (arus kas bersih dari aktivitas operasi), neraca (total aktiva, perubahan pendapatan dan piutang dan jumlah aktiva tetap).
2. Untuk menghitung variabel independen, data-data yang digunakan adalah:
 - a. Kepemilikan institusional: persentase saham yang dimiliki oleh investor institusional yang terdapat dalam laporan keuangan.
 - b. Kepemilikan manajerial: persentase saham yang dimiliki oleh investor manajerial yang terdapat dalam laporan keuangan.
 - c. Proporsi dewan komisaris independen: jumlah komisaris independen perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.
 - d. Ukuran dewan komisaris: jumlah anggota dewan komisaris perusahaan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.
 - e. Keberadaan komite audit: informasi tentang keberadaan komite audit perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan.

Semua data laporan keuangan perusahaan tahun 2005-2007 diperoleh dari *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD) dan Pusat Referensi Pasar Modal (PRPM) Bursa Efek Indonesia (BEI).

Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Adapun penentuan sampel dilakukan secara *purposive* dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan tersebut adalah perusahaan manufaktur yang telah *go public* dan terdaftar di BEI selama tahun 2005-2007.
2. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan per tanggal 31 Desember.
3. Perusahaan yang mengalami transaksi merger, akuisisi, restrukturisasi dan perubahan kelompok usaha selama periode penelitian yaitu tahun 2005-2007 tidak termasuk sampel dan dikeluarkan dari populasi.
4. Memiliki data-data informasi yang diperlukan dalam penelitian secara lengkap.

Prosedur Pengujian Hipotesis

Prosedur pengujian hipotesis untuk penelitian ini menggunakan metode statistik inferensi. Sebelumnya, akan dilakukan pula uji normalitas dan uji terhadap penyimpangan asumsi model klasik. Pengujian normalitas akan menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Pengambilan keputusan uji K-S ini berdasarkan tingkat signifikansi (α) yaitu 5%. Uji asumsi klasik meliputi: uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Pengujian Hipotesis pengaruh mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba (H1, H2, H3, H4, H5, dan H6) digunakan alat analisis regresi berganda. Model persamaan regresi tersebut sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e.....(6)$$

Dimana:

- Y : Manajemen laba.
- X₁ : Kepemilikan institusional.
- X₂ : Kepemilikan manajerial.
- X₃ : Proporsi dewan komisaris independen.
- X₄ : Ukuran dewan komisaris.
- X₅ : Komite audit.
- a : konstanta.
- b₁- b₅ : Koefisien regresi
- e : Error.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Obyek Penelitian

Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Total jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 adalah 146 perusahaan. Dengan menggunakan metode *purposive sampling*, dari populasi terpilih 96 perusahaan sampel yang memenuhi kriteria atau 65,75% dari jumlah total populasi. Penyeleksian sampel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1

Hasil Seleksi Sampel

KRITERIA SAMPEL	JUMLAH
Jumlah Populasi	146
Pengurangan Sampel Kriteria 1	
Emiten yang terdaftar sejak sebelum 31 Desember 2005 namun <i>delisting</i> sebelum 31 Desember 2007 dan emiten yang <i>listing</i> setelah 31 Desember 2005	(3)
Pengurangan Sampel Kriteria 2	(8)
Emiten yang tidak menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember	
Pengurangan Sampel Kriteria 3	
Emiten yang mengalami transaksi merger, akuisisi dan perubahan kelompok usaha selama 31 Desember 2005–31 Desember 2007	(39)

Pengurangan Sampel Kriteria 4 Emiten yang tidak memiliki data keuangan yang dibutuhkan dalam perhitungan	-
Jumlah Sampel Akhir	96

Sumber: *Indonesian Capital Market Directory 2007* (diolah)

Statistik Deskriptif

Secara keseluruhan, statistik deskriptif sampel penelitian dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Statistik Deskriptif Perusahaan Sampel

Keterangan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
DA	288	-0,31879	0,77870	-0,00569	0,11940
Kep. Institusional	288	0,0000	0,9800	0,69487	0,21817
Kep. Manajerial	288	0,0000	0,2561	0,02065	0,05142
Kom. Independen	288	0,0000	1,0000	0,33637	0,13687
Uk. Dwn. Komisaris	288	2	10	3,88	1,507
Komite Audit	288	0	1	0,80	0,399
Valid N (listwise)	288				

Sumber: Hasil olahan SPSS

Uji Asumsi Klasik

Analisis data berikut ini dilakukan dengan menggunakan bantuan program SPSS *for windows* versi 12.0.

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov-Smirnov Test*. Tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam pengujian ini adalah 0,05. Hasil dari uji normalitas yang diperoleh adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asymp. Sig. (2-tailed)	Keterangan	Kesimpulan
DA	0,015	< 0,05	Tidak normal
Kep. Institusional	0,000	< 0,05	Tidak normal
Kep. Manajerial	0,000	< 0,05	Tidak normal
Kom. Independen	0,000	< 0,05	Tidak normal
Uk. Dwn. Komisaris	0,000	< 0,05	Tidak normal
Komite Audit	0,000	< 0,05	Tidak normal

Sumber: Hasil olahan SPSS

Dari hasil uji normalitas terlihat bahwa semua variabel terdistribusi tidak normal. Untuk itu, keenam variabel yang ada diatas akan ditransformasi berdasarkan bentuk dari gambar histogram masing-masing variabel yang bisa dilihat pada lampiran 1-6. Hasil dari uji normalitas setelah transformasi adalah sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Setelah Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

			Unstandardized Residual
N			65
Normal Parameters	a,b	Mean	,0000000
		Std. Deviation	,14261609
Most Extreme Differences		Absolute	,158
		Positive	,158
		Negative	-,071
Kolmogorov-Smirnov Z			1,273
Asymp. Sig. (2-tailed)			,078

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber: Hasil olahan SPSS

Nilai signifikansi *Kolmogorov-Smirnov* di atas menunjukkan nilai $> 0,05$, maka data sudah berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilihat dari *tolerance value* dan VIF. Multikolinearitas tidak terjadi jika *tolerance value* $> 0,10$ dan $VIF < 10$. Berikut ini adalah hasil uji multikolinearitas dari perusahaan sampel.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
InvKep.Institusional	0,613	1,632	Tidak terjadi multikolinearitas
LnKep.Manajerial	0,444	2,252	Tidak terjadi multikolinearitas
Kom.Independen	0,842	1,188	Tidak terjadi multikolinearitas
Uk.Dwn.Komisaris	0,717	1,394	Tidak terjadi multikolinearitas
Komite Audit	0,791	1,264	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Hasil olahan SPSS

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Pendeteksian heteroskedastisitas sebelumnya meregresikan nilai absolut dari residual, heteroskedastisitas tidak terjadi jika *sig.* $> 0,05$. Tabel dibawah ini akan melihat hasil dari uji heteroskedastisitas.

Tabel 6
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan	Kesimpulan
InvKep.Institusional	0,647	$> 0,05$	Tidak terjadi heterokedastisitas
LnKep.Manajerial	0,429	$> 0,05$	Tidak terjadi heterokedastisitas
Kom.Independen	0,001	$< 0,05$	Terjadi heterokedastisitas
Uk.Dwn.Komisaris	0,158	$> 0,05$	Tidak terjadi heterokedastisitas
Komite Audit	0,145	$> 0,05$	Tidak terjadi heterokedastisitas

Sumber: Hasil olahan SPSS

d. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menggunakan uji Durbin Watson. Autokorelasi tidak terjadi jika nilai Durbin Watson berkisar antara d_u dan $4-d_u$. Hasil menunjukkan nilai Durbin Watson 1,811 (lihat lampiran 18). Nilai $D_L = 1,718$ dan $D_u = 1,820$ untuk $n = 200$ dan $k = 5$, karena angka 1,811 berada di antara 1,718 sampai 1,820 maka data ini bebas dari autokorelasi.

Pengujian Hipotesis

a. Uji Kebaikan Model

Nilai R^2 yang semakin tinggi maka semakin baik pula kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan perilaku variabel terikat. Hasil dari R^2 sebesar 0,075 yang berarti model regresi ini memberikan kontribusi atas penjelasan variabel-variabel yang terkandung di dalamnya sebesar 7,5%.

b. Uji t (Uji Parsial)

Untuk membuktikan hipotesis dalam penelitian ini maka data diolah dengan uji-t. Hasil pengujian hipotesis (uji-t) ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7
Hasil Uji-t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0,402	0,151		2,667	0,010
Inv.Kep.Institusional (X_1)	0,125	0,200	0,096	0,624	0,535
LnKep.Manajerial (X_2)	0,002	0,011	0,026	0,144	0,886
Kom.Independen (X_3)	-0,226	0,180	-0,164	-1,255	0,214
Uk.Dwn.Komisaris (X_4)	-0,022	0,013	-0,248	-1,750	0,085
Komite Audit (X_5)	-0,105	0,060	-0,237	-1,757	0,084

a Dependent Variable: SqrtDA

Sumber: Hasil olahan SPSS

Berdasarkan pengujian koefisien regresi yang terlihat pada tabel 7, maka formulasi persamaan regresi dapat disusun sebagai berikut:

$$Y = 0,402 + 0,125X_1 + 0,002 X_2 - 0,226X_3 - 0,022X_4 - 0,105X_5$$

Berdasarkan pada tabel 7 juga dapat diketahui H_1 , H_2 , H_3 , H_4 , dan H_5 diterima atau ditolak. Jika nilai *sig.* dari masing-masing uji-t $< 0,1$ maka H_1 , H_2 , H_3 , H_4 dan H_5 diterima:

1. Nilai *sig.* dari kepemilikan institusional (X_1) sebesar 0,535 dimana angka tersebut $> 0,1$ dan koefisiennya 0,125 maka H_1 ditolak yang berarti bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba (Y).
2. Nilai *sig.* dari kepemilikan manajerial (X_2) sebesar 0,886 dimana angka tersebut $> 0,1$ dan koefisiennya 0,002 maka H_2 ditolak yang berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba (Y).

3. Nilai sig. dari komisaris independen (X_3) sebesar 0,214 dimana angka tersebut $> 0,1$ dan koefisiennya $-0,226$ maka H_3 ditolak yang berarti bahwa komisaris independen tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba (Y).
 4. Nilai sig. dari ukuran dewan komisaris (X_4) sebesar 0,085 dimana angka tersebut $< 0,1$ dan koefisiennya $-0,22$ maka H_4 ditolak yang berarti bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan tetapi ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap manajemen laba (Y) seperti yang diungkapkan dalam hipotesis, melainkan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba (Y).
 5. Nilai sig. dari komite audit (X_5) sebesar 0,084 dimana angka tersebut $< 0,1$ dan koefisiennya $-0,105$ maka H_5 diterima yang berarti bahwa komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba (Y).
- c. Uji F (Uji Simultan)
Hasil dari uji F pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 8
Hasil Uji F

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,224	5	0,045	2,035	,087(a)
	Residual	1,302	58	0,022		
	Total	1,526	64			

a Predictors: (Constant), InvKepemilikan institusional, Lnkepemilikan manajerial, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit.

b Dependent Variable: SqrtDA

Sumber: Hasil olahan SPSS

Berdasarkan tabel 8 nilai signifikansi dari uji F adalah sebesar 0,087 dimana angka tersebut $< 0,1$ maka H_6 diterima yang berarti bahwa kepemilikan institusional (X_1), kepemilikan manajerial (X_2), komisaris independen (X_3), ukuran dewan komisaris (X_4), dan komite audit (X_5) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Y).

Pembahasan

Penelitian ini menemukan bukti adanya praktik manajemen laba sebagai upaya untuk merekayasa laporan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2005-2007. Dari 96 perusahaan sampel, terdapat 53 perusahaan (55,21%) yang mempunyai rata-rata *discretionary accruals* (DA) bertanda negatif yang berarti bahwa 53 perusahaan tersebut telah melakukan manajemen laba dengan cara menurunkan laba (*income decreasing*) dan 43 perusahaan (44,79%) telah melakukan manajemen laba dengan cara meningkatkan laba (*income increasing*).

Dari hasil uji-t terhadap variabel kepemilikan institusional (X_1), menunjukkan koefisien regresi 0,125 (berpengaruh positif) dengan tingkat signifikansi 0,535 artinya kepemilikan institusional tidak berpengaruh signifikan

terhadap manajemen laba dan semakin tinggi kepemilikan institusional, maka semakin tinggi besaran manajemen laba. Oleh karena itu H1 ditolak yang berarti kepemilikan institusional tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *earnings management*. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan McConell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan Hawkins (1999), dan Hartzell dan Starks (2003) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan atau konsep yang mengatakan bahwa institusional adalah pemilik sementara dan lebih memfokuskan pada laba jangka pendek, sebagaimana dikemukakan oleh Porter (1992) dalam Boediono (2005). Akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek, misalnya dengan melakukan manipulasi laba.

Dari hasil uji-t terhadap variabel kepemilikan manajerial (X_2), menunjukkan koefisien regresi 0,002 (berpengaruh positif) dengan tingkat signifikansi 0,886 artinya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan semakin tinggi kepemilikan manajerial, maka semakin tinggi besaran manajemen laba. Oleh karena itu H2 ditolak yang berarti kepemilikan manajerial tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *earnings management*. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian yang dilakukan Warfield dkk. (1995) dalam Siallagan dan Machfoedz (2006) yang menemukan bukti bahwa kepemilikan manajerial berhubungan secara negatif dengan manajemen laba. Hal ini disebabkan karena dalam penelitian ini banyak sampel yang tidak memiliki kepemilikan manajerial. Dari 96 perusahaan yang menjadi sampel, hanya 48 perusahaan yang memiliki kepemilikan manajerial, dengan persentase kepemilikan manajerial yang sangat rendah dan sisanya tidak memiliki kepemilikan manajerial. Dengan demikian, hasilnya kurang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial akan mempengaruhi aktivitas manajemen laba.

Dari hasil uji-t terhadap variabel Komisaris independen (X_3), menunjukkan koefisien regresi -0,226 (berpengaruh negatif) dengan tingkat signifikansi 0,214 artinya komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan semakin tinggi jumlah komisaris independen, maka semakin kecil besaran manajemen laba. Oleh karena itu H3 ditolak yang berarti komisaris independen tidak berpengaruh negatif signifikan terhadap *earnings management*. Hal ini diduga karena peranan dewan komisaris independen di Indonesia belum efektif sehingga kurang efektif dalam menghambat manajemen laba, terlihat dari rata-rata perusahaan yang *go public* meskipun mempunyai dewan komisaris independen, praktek manajemen laba tetap dapat terjadi pada perusahaan tersebut.

Dari hasil uji-t terhadap variabel ukuran dewan komisaris (X_4), menunjukkan koefisien regresi -0,022 (berpengaruh negatif) dengan tingkat signifikansi 0,085 artinya ukuran dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, akan tetapi ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif signifikan. Oleh karena itu H4 ditolak yang berarti ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif signifikan terhadap *earnings management*.

Hal ini diduga, semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris dapat lebih membantu dewan komisaris dalam menjalankan fungsinya, mengingat tugas dan tanggung jawab dewan komisaris yang sangat banyak dalam menjalankan kepengurusan perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Dari hasil uji-t terhadap variabel komite audit (X_5), menunjukkan koefisien regresi $-0,105$ (berpengaruh negatif) dengan tingkat signifikansi $0,084$ artinya keberadaan komite audit berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba dan keberadaan komite audit dapat mengurangi besaran manajemen laba. Oleh karena itu H_5 diterima yang berarti komite audit berpengaruh negatif signifikan terhadap *earnings management*. Hal ini mendukung penelitian Xie, Davidson, dan Dadalt (2003) dalam Nasution dan Setiawan (2007) yang menyatakan bahwa komite audit mampu melindungi kepentingan pemegang saham dari tindakan manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajemen

Dari hasil uji F menunjukkan tingkat signifikansi sebesar $0,087$. Oleh karena tingkat signifikansi hitung lebih kecil dari tingkat signifikansi yang digunakan yaitu sebesar $0,1$, maka H_6 diterima yang berarti variabel bebas yang terdiri dari kepemilikan institusional (X_1), kepemilikan manajerial (X_2), komisaris independen (X_3), ukuran dewan komisaris (X_4), dan komite audit (X_5) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat yaitu *earnings management* (Y). Selain itu, dari hasil uji F yang dilakukan telah tampak koefisien determinasi (R^2) sebesar $0,075$. Hal ini berarti variabel bebas yang dimasukkan dalam model (kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dan komite audit) secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel terikat yaitu *earnings management* sebesar $7,5\%$, sedangkan sisanya sebesar $92,5\%$ dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak dimasukkan dalam model.

Simpulan dan Saran

Simpulan

Penelitian ini menguji pengaruh beberapa mekanisme *corporate governance* terhadap manajemen laba. Berdasarkan beberapa hasil penelitian empiris terdahulu, mekanisme ini diyakini memiliki pengaruh terhadap manajemen laba. Penelitian menggunakan sampel perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2005-2007 dan mekanisme *corporate governance* yang diteliti adalah kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit.

Dari penelitian yang dilakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan perhitungan *discretionary accruals* dengan menggunakan modifikasi model Jones, terdapat 53 perusahaan ($55,21\%$) yang mempunyai rata-rata *discretionary accruals* bertanda negatif yang mengindikasikan bahwa perusahaan melakukan manajemen laba dengan pola *income decreasing*. Empat puluh tiga perusahaan lainnya ($44,79\%$) terindikasi melakukan manajemen laba dengan pola *income increasing* karena mempunyai rata-rata *discretionary accruals* bertanda positif.

2. Dari hasil uji F, ditemukan bahwa kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap praktek manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis alternatif (H6) diterima, yang berarti mekanisme GCG berpengaruh terhadap manajemen laba.
3. Uji t menunjukkan bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian disimpulkan, komite audit mampu mengurangi konflik kepentingan yang mendorong timbulnya manajemen laba dan mampu menjadi mekanisme kontrol yang dapat menghambat praktek manajemen laba. Variabel ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris mampu mengurangi konflik kepentingan yang mendorong timbulnya manajemen laba dan mampu menjadi mekanisme kontrol yang dapat menghambat praktek manajemen laba. Variabel lainnya yaitu kepemilikan institusional (X_1), kepemilikan manajerial (X_2) dan komisaris independen (X_3) tidak terbukti mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba.

Saran

Hasil penelitian sekarang berhasil menemukan adanya praktek manajemen laba. Dimungkinkan praktek tersebut disebabkan karena adanya kelemahan inheren dari metode akuntansi yang memberikan peluang bagi manajemen untuk melakukan rekayasa laba berkaitan dengan keterbatasan standar yang ada dan peluang untuk melakukan manajemen laba secara sah. Untuk itu, pihak-pihak yang berwenang, seperti BAPEPAM dan IAI perlu membuat standar pelaporan yang memberikan batasan dalam penggunaan metode dan prinsip akuntansi yang lebih efektif agar tidak disalahgunakan oleh manajemen untuk memanipulasi informasi keuangan kepada pihak eksternal. Di samping itu, dalam pengambilan keputusan investasi, pihak investor hendaknya juga mempertimbangkan dengan cermat dalam menentukan emiten yang akan dipilih agar tidak terjebak dalam praktek manajemen laba.

Hasil penelitian ini menggunakan tingkat penolakan/penerimaan hipotesis alternatif dengan tingkat signifikansi 10%, yang berarti bahwa tingkat kesalahan hasil penelitian adalah sebesar 10%. Hal ini kurang baik untuk itu penelitian berikutnya diharapkan dapat memperbesar jumlah sampel ataupun meneliti perusahaan dari sektor selain manufaktur, seperti asuransi atau perbankan. Penelitian berikutnya juga dapat memperpanjang periode atau rentang waktu penelitian.

Di samping itu, variabel proporsi komisaris independen dan keberadaan komite audit yang mewakili karakteristik komisaris independen dan komite audit dalam hubungannya dengan efektivitas fungsi *monitoring*, hanya merupakan salah satu dari beberapa karakteristik komisaris independen dan komite audit. Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, penelitian selanjutnya sebaiknya memasukkan pula karakteristik lain dari komisaris independen dan komite audit seperti

kompetensi, latar belakang pendidikan, pengalaman dan ukuran. Penelitian selanjutnya juga dapat mencari ukuran lain bagi kualitas audit selain reputasi auditor. Penelitian selanjutnya juga dapat menguji variabel lain yang berkaitan dengan manajemen laba.

Daftar Rujukan

- Achmad, K., Subekti, I., dan Atmini, S. 2007. "Investigasi Motivasi dan Strategi Manajemen Laba Pada Perusahaan Publik di Indonesia". *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*, Juli. Hal. 1-28.
- Boediono, G. 2005. "Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur". *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi VIII Solo*, September. Hal. 172-194.
- Darmawati, D., Khomsiyah, dan Rahayu, R.G. 2004. "Hubungan Corporate Governance dan Kinerja Perusahaan". *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi VII Denpasar Bali*, Desember. Hal. 391-407.
- Faizal. 2004. "Analisis Agency Cost, Struktur Kepemilikan, dan Mekanisme Corporate Governance". *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi VII Denpasar Bali*, Desember. Hal. 197-207.
- FCGI. 2001. *Corporate Governance*. Jil:d 1. Edisi ketiga.
- FCGI. Tanpa Tahun. *Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan Corporate Governance (Tata Kelola Perusahaan)*. Jilid 2. Edisi kedua.
- Halim, J., Meiden, C., dan Tobing, R.L. 2005. "Pengaruh Manajemen Laba Pada Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang Termasuk dalam Indeks LQ-45". *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi VII Solo*, September: 117-135.
- Herwidayatmo. 2000. "Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik Indonesia". *Usahawan*. Tahun XXIX. No. 10. Oktober. Hal. 25-32.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2007. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Isgiyarta, J., dan Tristiarini, N. 2005. "Pengaruh Penerapan Prinsip Corporate Governanace Terhadap Abnormal Return Pada Saat Pengumuman Laporan Keuangan". *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. 12, No. 2, September: 169-187.
- Lindrawati. 2003. "Corporate Governance dan Kinerja Keuangan Sektor Perbankan di BEJ". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol.6 No.1, Desember: 19-36.
- Mutia, N. 2003. "Hanya 10 Perusahaan Publik Yang Laksanakan Good Corporate Governance". (Online). (http://www.tempointeraktif.com/hg/ekbis/2003/06/02/brk_2003060220.id.html, diunduh 17 Juni 2008).

- Ma'ruf, M. 2006. "Analisa Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba Pada Perusahaan Go Public di Bursa Efek Jakarta". Skripsi Sarjana tak dipublikasikan, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
- Nasution, M., dan Setiawan, D. 2007. "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia". *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi X Makassar*. Juli. Hal. 1-26.
- Radita, K. 2006. "Analisis Pengaruh Penerapan Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Aktivitas Manajemen Laba Perusahaan". Skripsi Sarjana tak dipublikasikan, Universitas Airlangga Surabaya.
- Rahmawati, Suparno, Y., dan Qomariyah, N. 2006. "Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Praktik Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta". *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*. Agustus. Hal. 1-28.
- Sheridan, T., dan Kendal, N. 1996. *Suatu Rencana Tindakan Demi Mendapatkan Keuntungan Dan Keberhasilan Bisnis*, Jakarta: Penerbit PT Alex Media Komputindo.
- Siallagan, H., dan Machfoedz, M. 2006. "Mekanisme Corporate Governance, Kualitas Laba dan Nilai Perusahaan". *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi IX Padang*. Agustus. Hal. 1-23.
- Tunggal, I.S., dan Tunggal, A.W. 2002. *Membangun Good Corporate Governance (GCG)*. Penerbit Harvarindo.
- Ujiyantho, M.A., dan Pramuka, B.A. 2007. "Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan", *Proceedings Simposium Nasional Akuntansi X Unhas Makassar*. Juli. Hal. 1-26.
- Widyaningdyah, A.U. 2001. "Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Go Public di Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan keuangan*, Vol. 3. No. 2. April. Hal. 89-101.
- Wignjohartojo, P. 2001. "Good Corporate Governance: Implementasi Beserta Implikasi dan Masa depannya", *Majalah Ekonomi*, Tahun XI, No. 1, April. Hal. 64-77.
- Wild, J.J., Subramanyam, K.R., and Halsey, R.F. 2005. *Financial Statement Analysis*, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.